



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN PRONOJIWO**

**LAPORAN KINERJA (LKj)  
TRIWULAN I  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KECAMATAN PRONOJIWO**  
Jl. Raya Pronojiwo No. 112  
Telp. /Fax. (0334) 590045  
e-mail :  
[kec\\_pronojiwo@lumajangkab.go.id](mailto:kec_pronojiwo@lumajangkab.go.id)  
**PRONOJIWO**  
**67374**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Pronojiwo Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang "Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja" menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang periode triwulan I Tahun 2024.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Pronojiwo Tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Pronojiwo dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Pronojiwo.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 11 Maret 2024  
BUPATI KECAMATAN PRONOJIWO  
KECAMATAN PRONOJIWO  
**HANI PUJIANTO, SH**  
NIP. 097000299199302 1 002



# **BAB I**

## **PENDAULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Laporan Kinerja triwulan I adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan ini berisi tentang capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Lumajang triwulan I Tahun 2024.

### **b. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan” yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Kecamatan Pronojiwo dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pronojiwo. Di mana Kecamatan Pronojiwo memiliki 6 Desa. Kecamatan Pronojiwo dipimpin oleh Camat Pronojiwo yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Pronojiwo terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambardibawah ini :



### c. Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Pronojiwo, adalah sebagai berikut :

Personalia Kepegawaian Kecamatan Pronojiwo per Maret 2024

NO	NAMA	L/P	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ Gol	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	HANI PUJIAN TO, SH	L	PNS	Penata Tk. I (III/d)	III A	S.1
	NIP. 19700929 199302 1 002					
2	SAHRUN NASHIR, S.Sos	L	PNS	Penata Tk. I (III/d)	III B	S.1
	NIP. 19860515 201101 1 007					
3	NURDI HARTO PUTRA ARDIANSYAH, S.STP	L	PNS	Penata Muda Tk. I ( III/b)	IV A	S.1
	NIP. 19950311 201808 1 001					
4	SAHLAN, S.Sos	L	PNS	Penata Muda Tk. I ( III/b)	IV A	S.1
	NIP. 19740816 200906 1 001					
5	ROOSALITHA ARISDAYANTI, S.Pd.SD	P	PNS	Pengatur Tk.I (III/a)	IV B	S.1
	NIP. 19850402 201406 2 001					
6	BEJO NGATEMAN	L	PNS	Penata Muda (III/a)	IV B	S.1
	NIP. 19670513 199403 1 015					
7	MUGANI NIP. 19660410 200701 1 038	L	PNS	Pengatur Tk.I (II/d)	-	SMA
8	KUSIADI	L	PNS	Pengatur	-	SMA

NO	NAMA	L/P	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ Gol	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
	NIP. 19680515 200701 1 059			Tk.I (II/d)		
9	RUKMINI	P	PNS	Pengatur (II/c)	-	SMA
	NIP. 19701004 201001 2 003					
10	YOYOK HERI WAHYUDI	L	NON PNS		-	SMK
11	MARDYAH AYU PERMATASARI	P	NON PNS		-	SMA
12	VENI FITRIA	P	NON PNS		-	S. 1
13	PRIONO	L	NON PNS		-	SMA
14	ARUM SARAS PERTIWI	P	NON PNS		-	SMK
15	FAHMI MUBAROK	L	NON PNS		-	S.1
16	ALFAN SALIM	L	NON PNS		-	SMK
17	MISTARI	L	NON PNS		-	SMA
18	NGADI	L	NON PNS		-	SMK
19	IVAN FEBRIAN	L	NON PNS		-	SMA

#### d. Permasalahan Utama (*Stretegic Issued*)

##### Analisis SWOT

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Pronojiwo berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Pronojiwo dapat di identifikasikan

##### I. Faktor Kekuatan (*Strengths*)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Pronojiwo;
2. Pegawai Kecamatan Pronojiwo bekerja secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, berdedikasi terhadap tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab;
3. Kantor Kecamatan Pronojiwo memiliki system kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Kantor Kecamatan Pronojiwo memelihara hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta

suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

## **II. Faktor Kelemahan (Weakness)**

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas;
3. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*)
4. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
6. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.
7. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya yang tidak disertai dengan anggaran;
8. Kecamatan Pronojiwo merupakan wilayah yang terkena dampak bencana alam yang menyebabkan akses jalan dari dan ke Kecamatan pronojiwo rusak parah.

## **III. Faktor Peluang (Opportunity)**

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari PD terkait;
3. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya administrasi kependudukan.
4. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
5. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;
6. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
7. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
8. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;

## **IV. Faktor Ancaman (Threats)**

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang

efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);

2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Pronojiwo didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Kendala yang ada pada Kecamatan Pronojiwo

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan belum optimal	Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
		Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai
		Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas;
	penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan Desa belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
		Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa
		Kurangnya Koordinasi dengan PD pengampu kebijakan sehingga sering terjadi miss Komunikasi terkait informasi yang diterima

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pronojiwo merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang terintegrasi dengan potensi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Lumajang, dalam hal ini di Kecamatan Pronojiwo.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang telah melaluitahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dengan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2024.

#### **2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

##### **Visi**

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lumajang. Visi Kabupaten Lumajang tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

## **“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**

### **Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Kecamatan Pronojiwo untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki disesuaikan dengan Misi 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Lumajang yakni :

“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik benar dan bersih (good and clean governance)”

### **2.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan dari Kecamatan Pronojiwo sesuai dengan misinya adalah :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

### **2.4 Kebijakan Program**

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Pronojiwo mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Kecamatan Pronojiwo yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat;
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa melalui peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa;
3. Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan forkopincam;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Pronojiwo melalui pengumpulan/ inventarisir usulan program/ kegiatan pembangunan;

5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya;
6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana alam. Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program Kecamatan Pronojiwo sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah :
  - a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  - d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  - f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

## **2.5 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Kecamatan Pronojiwo adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HANI PUJIANTO, SH

Jabatan : CAMAT PRONOJIWO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,  
  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Pihak Pertama,  
  
**HANI PUJIANTO, SH**  
NIP. 6900929 199302 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PRONOJIWO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	93%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	83%

Program	Anggaran	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.869.322.744	DAU
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 19.450.000	DAU
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 174.323.750	DAU
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 24.705.000	DAU
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 12.525.000	DAU
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 32.470.000	DAU
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.132.796.494</b>	

Lumajang, 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG  
  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

PEMERINTAH KABUPATEN PRONOJIWO  
  
**HANI PUJANTO, SH**  
 NIP. 19700929 199302 1 002

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Kecamatan Pronojiwo**

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Pronojiwo triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	93%	30,95%	33,28%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	83%	33,33%	39,22%	
<b>Capaian Rata-rata</b>					<b>36,72%</b>	

Penjelasan :

- a. Indikator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti  
Diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah keseluruhan fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

Tabel  
Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti

No	Nama Fasilitasi	Terlaksana	Belum terlaksana
1	Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja		√
2	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran		√

No	Nama Fasilitas	Terlaksana	Belum terlaksana
3	Fasilitas penyusunan Laporan Keuangan	√	
4	Fasilitas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan		√
5	Fasilitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	√	
6	Fasilitas Penyaluran Santunan Kematian	√	
7	Fasilitas Sosialisasi Pelayanan Publik		√
8	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD		√
9	Fasilitas Musdes yang partisipatif	√	
10	Fasilitas Musrenbangdes yang partisipatif		√
11	Fasilitas Musrenbangcam yang partisipatif	√	
12	Fasilitas Penyusunan RKPDes partisipatif		√
13	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes		√
14	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	√	
15	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes		√
16	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes		√
17	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;		√
18	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;		√
19	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;		√
20	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;		√
21	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes		√
22	Fasilitas pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	√	
23	Fasilitas pembinaan Administrasi Penduduk;	√	
24	Fasilitas pembinaan Adminiatrasi Keuangan;		√
25	Fasilitas pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)		√
26	Fasilitas Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa		√
27	Fasilitas Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	√	
28	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa		√
29	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa		√
30	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD		√
31	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;		√
32	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;		√
33	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam		√
34	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes		√
35	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMDes		√
36	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan		√

No	Nama Fasilitas	Terlaksana	Belum terlaksana
	Penyusunan RKPDes		
37	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes		√
38	Pembinaan LINMAS	√	
<b>JENIS REKOMENDASI</b>			
1	Koordinasi Pendampingan Desa	√	
2	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	√	
<b>JENIS REKOMENDASI</b>			
1	Fasilitas Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa		√

Dari ke 38 (tiga puluh delapan) jenis fasilitas, 2 (dua) jenis koordinasi dan 1 (satu) jenis rekomendasi target diatas tercapai 11 (sebelas) jenis fasilitas dan 2 (dua) jenis koordinasi:

Dengan rumus dibawah ini diperoleh hasil :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitas dan Koordinasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{13}{42} \times 100\%$$

$$= \underline{\underline{30,95\%}}$$

- b. Indikator : Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa})} \times 100\%$$

1. RKPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Desember 2024
2. APBDes tenggang waktu pengumpulan Juni – September 2024

3. LPPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Maret 2024

Dari daftar dokumen diatas, yang baru terkumpul adalah dokumen LPPDes dan dari 6 desa yang ada di Kecamatan Pronojiwo semuanya dapat terkumpul tepat waktu.

$$= \frac{6 + 0 + 0}{(6 \times 3)} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{18} \times 100\%$$

$$= \underline{\underline{33\%}}$$

- a. Data Dokumen LPPDesa yang dijadwalkan untuk pengumpulannya pada bulan Januari s/d Maret 2024.

No.	Desa	Tanggal diundangkan	Proses		Ket
			Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	
1.	Sidomulyo	31 Januari 2024	√		
2.	Pronojiwo	8 Maret 2024	√		
3.	Tamanayu	28 Februari 2024	√		
4.	Sumberurip	31 Desember 2023	√		
5.	Oro-Oro Ombo	10 Januari 2024	√		
6.	Supiturang	30 Januari 2024	√		

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dengan tahun 2023.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pertama dari sasaran strategis Kecamatan Pronojiwo Tahun 2023 dengan Tahun 2024 triwulan I :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi TW I
1.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93%	100%	93%	30,95%

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kedua dari sasaran strategis Kecamatan Pronojiwo Tahun 2023 dengan Tahun 2024 triwulan I :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi TW I
1.	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85%	100%	83%	33,33%

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Kecamatan sudah sesuai dengan target, namun hal tersebut masih ada beberapa kendala yang dialami, di antara nya:

- a. Publikasi yang belum optimal;
- b. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- c. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas;
- d. Kondisi alam pada Kecamatan Pronojiwo yang rawan bencana;
- e. Kurangnya pemahaman perangkat desa terkait administrasi baik dari segi kuantitas dan kualitas yang menyebabkan Kinerja Perangkat Desa belum maksimal;
- f. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan time schedule karena adanya penyesuaian DPA SKPD.

Dari faktor – faktor permasalahan diatas Kecamatan Pronojiwo berupaya mengatasi masalah tersebut dengan diantaranya :

- a. Meningkatkan publikasi secara masal baik di FB, WA, Instagram dan di website serta mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah desa;
- b. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dengan tepat sasaran;
- c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
- d. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari PD terkait untuk peningkatan kapasitas aparatur;
- e. Optimalisasi SDM yang ada;
- f. Sinergitas dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas perangkat desa;

- g. Simulasi penanggulangan bencana;
- h. Mengoptimalkan penyusunan time schedule

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja :

- a. Menindaklanjuti setiap saran dan perbaikan untuk evaluasi nilai IKM per 3 bulan sesuai dengan surat yang diedarkan;
- b. Pembinaan sudah dilaksanakan dengan pendampingan dari OPD pengampu.
- c. Melakukan evaluasi secara berkala untuk administrasi desa.
- d. Sinergi dan kerjasama antar seksi dalam melakukan kegiatan sesuai perencanaan
- e. Pelaksanaan rapat secara berkala untuk evaluasi kinerja seksi dan subag.

#### 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 19 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 9 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 10 orang. Jumlah Pegawai Kecamatan Pronojiwo berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Pronojiwo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1	SD	-	-	-	-	0%
2	SMP	-	-	-	-	0%
3	SMA/SMK	3	-	8	11	52%
4	D3	-	-	-	-	0%
5	S1	6	-	2	8	48%
6	S2	-	-	-	-	0%
J U M L A H		9	-	10	19	100%

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Pronojiwo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SMA sebanyak 11 orang (52%); selanjutnya jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (48%).

Jumlah Pegawai Kecamatan Pronojiwo berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

### Jumlah Pegawai Kecamatan Pronojiwo Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	2	0	2
3.	Golongan III	7	0	7
4.	Golongan IV	0	0	0
Jumlah		9	0	9

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 7 orang, golongan ruang II sebanyak 2 orang, golongan ruang IV sebanyak 0 orang, dan tidak memiliki pegawai golongan ruang I, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Pronojiwo telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16

### Pegawai Kecamatan Pronojiwo yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2023

No.	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	2
4.	IV	2
Jumlah		3

Pegawai Kecamatan Pronojiwo telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17

### Pegawai Kecamatan Pronojiwo Berdasarkan Eselon Tahun 2023

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	-

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
2.	II b	-
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	3
6.	IV b	2
Jumlah		7

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pronojiwo, sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Masih kurang pemahamannya perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Pronojiwo dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Masih belum ada tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja kecamatan melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran SKPD atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman peraturan perundangan tentang Laporan Kinerja Tahunan.
- c. Menyelaraskan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Pronojiwo dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Telah ditertibkannya tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lebih awal.

**5. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.**

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pronojiwo sebagai bahan penunjang Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

<b>Kode</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
<b>7.01.02.2.03</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-

	Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja program tahun 2024 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pronojiwo semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Pronojiwo tahun 2024.

## **B. Realisasi Anggaran**

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Pronojiwo. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Pronojiwo dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Pronojiwo untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan

Tabel Realisasi Anggaran 2024

KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW 1	SISA ANGGARAN
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	19,450,000	1,870,000	17,580,000
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	3,900,000	-	3,900,000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3,900,000	-	3,900,000
7.01.02.2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	2,850,000	-	2,850,000
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2,850,000	-	2,850,000
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	12,700,000	1,870,000	10,830,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,700,000	1,870,000	10,830,000
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	174,323,750	4,650,000	169,673,750
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	132,478,750	-	132,478,750
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2,300,000	-	2,300,000
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6,700,000	-	6,700,000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	123,478,750	-	123,478,750
7.01.03.2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	41,845,000	4,650,000	37,195,000
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	18,625,000	4,125,000	14,500,000
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga			

KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW 1	SISA ANGGARAN
	dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	3,000,000	-	3,000,000
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3,720,000	300,000	3,420,000
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2,850,000	-	2,850,000
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2,850,000	-	2,850,000
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6,600,000	225,000	6,375,000
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	4,200,000	-	4,200,000
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>24,705,000</b>	<b>-</b>	<b>24,705,000</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>24,705,000</b>	<b>-</b>	<b>24,705,000</b>
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24,705,000	-	24,705,000
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>12,525,000</b>	<b>600,000</b>	<b>11,925,000</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>12,525,000</b>	<b>600,000</b>	<b>11,925,000</b>
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1,125,000	-	1,125,000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11,400,000	600,000	10,800,000
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,869,322,744</b>	<b>445,565,919</b>	<b>1,423,756,825</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12,000,000</b>	<b>-</b>	<b>12,000,000</b>
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000	-	2,500,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,000,000	-	4,000,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,500,000	-	2,500,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,000,000	-	3,000,000

KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW 1	SISA ANGGARAN
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,313,259,147</b>	<b>350,078,467</b>	<b>963,180,680</b>
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,276,047,147	344,876,467	931,170,680
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29,712,000	4,602,000	25,110,000
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,000,000	300,000	2,700,000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,000,000	-	1,000,000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,500,000	300,000	3,200,000
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4,500,000</b>	<b>-</b>	<b>4,500,000</b>
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,000,000	-	2,000,000
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,500,000	-	2,500,000
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1,195,000</b>	<b>-</b>	<b>1,195,000</b>
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1,195,000	-	1,195,000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>125,162,247</b>	<b>40,225,700</b>	<b>84,936,547</b>
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2498499	2,444,200	54,299
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,657,563	29,351,500	5,306,063
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,100,185	225,000	4,875,185
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5,854,000	405,000	5,449,000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,500,000	600,000	6,900,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,552,000	7,200,000	62,352,000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>34,465,500</b>	<b>11,070,000</b>	<b>23,395,500</b>
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,465,500	11,070,000	23,395,500
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>252,961,100</b>	<b>40,301,752</b>	<b>212,659,348</b>
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	-	1,500,000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,830,000	4,369,532	36,460,468
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210,631,100	35,932,220	174,698,880
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>125,779,750</b>	<b>3,890,000</b>	<b>121,889,750</b>

KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW 1	SISA ANGGARAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,292,750	2,810,000	29,482,750
7.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2,500,000	-	2,500,000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,100,000	1,080,000	15,020,000
7.01.01.2.09.00109	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	74,887,000	-	74,887,000
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>32,470,000</b>	<b>300,000</b>	<b>32,170,000</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>32,470,000</b>	<b>300,000</b>	<b>32,170,000</b>
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,170,000	300,000	9,870,000
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14,200,000	-	14,200,000
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5,700,000	-	5,700,000
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2,400,000	-	2,400,000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 2,132,796,494</b>	<b>Rp 452,985,919</b>	

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja pada Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang adalah dengan melakukan inovasi – inovasi pelayan publik guna meningkatkan capaian kinerja yang baik. Inovasi yang telah dan sedang dilakukan di Kecamatan Pronojiwo sebagai berikut:

1. JUDUL INOVASI : **TUNTASKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GRATIS TANPA BIAYA TINGGAL MENUNGGU DIRUMAH (TUMPAK SEWU MANTAB)**

Inovasi dilaksanakan mulai 22 Agustus 2020 sampai dengan sekarang.

**A. Latar Belakang Masalah**

Rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Pronojiwo dalam mengurus Administrasi Kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya karena ketidaktahuan mereka tentang pentingnya administrasi kependudukan, untuk masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik tidak bisa melakukan penerbitan dokumen, letak geografis desa-desa yang sangat luas dan topografinya yang sangat ekstrem dan terbelah oleh sungai curah koboan dan mata pencaharian masyarakat banyak sebagai buruh petani atau sector informal lainnya sehingga

kesulitan untuk menikmati pelayanan ke kantor kecamatan secara langsung untuk pengurusan dokumen. Selama ini masyarakat masih befikir bahwa mengurus dokumen kependudukan itu sulit hanya apabila mereka dibantu oleh orang lain yang pada akhirnya orang tersebut meminta uang untuk kepengurusan dokumen dan masyarakat masih beranggapan bahwasanya dokumen kependudukan ada biayanya oleh sebab itu banyak dari warga yang menjadi calo/penjual jasa untuk mengurus administrasi kependudukan dengan harapan dapat memberikan tarif sesuai keinginannya. Sehingga masyarakat belum menyadari bahwa dokumen kependudukan sebenarnya mudah untuk menyelesaikan administrasinya. Masyarakat terkadang enggan untuk mengurus administrasi kependudukan yang menurut mereka masih sangat sulit, sehingga ada potensi calo/pungli yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan penjual jasa

## **B. Tujuan**

Dari semua latar belakang masalah tersebut diatas, Kecamatan Pronojiwo membuat Inovasi Tuntaskan Administrasi Kependudukan Gratis Tanpa Biaya Tinggal Menunggu dirumah sehingga masyarakat yang mempunyai keterbatasan tidak perlu datang ke kantor kecamatan, namun tim Tumpak Sewu Mantab akan mendatangi masyarakat tersebut.

## **C. Manfaat**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan inovasi tersebut adalah:

1. Ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kecamatan Pronojiwo telah memberikan pelayanan secara totalitas di tengah sarana yang terbatas.
2. Dengan inovasi Tumpak Sewu Mantab, dapat mengurangi potensi calo dalam memberikan layanan jasa pengurusan dokumen
3. Dapat mengurangi beban biaya transportasi masyarakat di tengah keterbatasan pelayanan yang harusnya diberikan secara optimal kepada masyarakat.

Dampak Inovasi TUMPAK SEWU MANTAB antara lain:

Sebelum adanya Inovasi TUMPAK SEWU MANTAB

1. Untuk masyarakat yang mempunyai keterbatan baik fisik maupun biaya akomodasi perjalanan cenderung mengurungkan niatnya untuk mengajukan penerbitan maupun perekaman Administrasi Kependudukan

2. Letak geografis desa di wilayah Kecamatan Pronojiwo mempunyai topografinya yang sangat ekstrem dan terlebih lagi wilayah Kecamatan Pronojiwo rawan bencana alam sehingga masyarakat kesulitan untuk pengurusan dokumen.

Setelah adanya Inovasi TUMPAK SEWU MANTAB

1. Masyarakat termudahkan untuk pengajuan penerbitan dan perekaman Administrasi Kependudukan
2. Untuk masyarakat yang rumahnya berada di daerah topografi yang sangat ekstrem merasakan kemudahan untuk pengajuan penerbitan dan perekaman Administrasi Kependudukan.
3. Untuk masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dapat dengan mudah untuk mengajukan penerbitan dan perekaman Administrasi Kependudukan
4. Menghindari adanya pihak – pihak yang memanfaatkan jasa untuk mendapatkan uang dari hasil dokumen kependudukan;

#### **D. Kendala Pelaksanaan Inovasi**

Setelah dilakukan inovasi Tuntaskan Administrasi Kependudukan Gratis Tanpa Biaya Tinggal Menunggu dirumah terdapat beberapa masalah antara lain

1. Inovasi Tumpak Sewu Mantap tidak disertai dengan dukungan Anggaran, sehingga tim secara sukarela menanggung Akomodasi untuk mengantarkan dokumen administrasi kependudukan kepada Masyarakat yang pada akhirnya dilakukan hanya sesuai kebutuhan.
2. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan inovasi ini;

## 2. JUDUL INOVASI : **PESAT (Pelayanan Hari Sabtu Sampai Tuntas)**

Inovasi dilaksanakan mulai 21 Januari 2021 sampai dengan sekarang.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Pronojiwo dalam mengurus Administrasi Kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya untuk masyarakat yang tidak bisa mengurus administrasi kependudukan pada jam kerja dikarenakan warga yang sedang sekolah atau sedang bekerja yang tidak bisa ditinggalkan. Selama ini masyarakat masih kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan pada waktu jam kerja hanya apabila mereka dibantu oleh orang lain yang pada akhirnya orang tersebut meminta biaya untuk kepengurusan dokumen kependudukan tersebut. Sehingga masyarakat belum menyadari bahwa dokumen kependudukan sebenarnya gratis dan mudah untuk menyelesaikannya. Masyarakat terkadang enggan untuk mengurus administrasi kependudukan yang menurut mereka masih memprioritaskan pekerjaannya waktu jam kerja pelayanan, Masyarakat topografinya yang sangat ekstrem dan plosok yang jarak tempuhnya jauh ke kantor kecamatan dan hanya bisa menikmati pelayanan pada hari-hari tertentu, sehingga ada potensi calo/pungli yang dilakukan oleh oknum yang mengatas namakan penjual jasa.

### **B. Tujuan**

Dari semua latar belakang masalah tersebut diatas, Kecamatan Pronojiwo membuat Inovasi Pelayanan Hari Sabtu Sampai Tuntas sehingga masyarakat bisa melakukan pelayanan secara langsung walaupun libur jam kerja kantor kecamatan, namun tim PESAT akan melayani masyarakat tersebut.

### **C. Manfaat**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan inovasi tersebut adalah:

1. Ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kecamatan Pronojiwo telah memberikan pelayanan walaupun hari libur jam kerja pelayanan.
2. Dengan inovasi PESAT, dapat mengurangi potensi calo dalam memberikan layanan jasa pengurusan dokumen
3. Kebutuhan masyarakat terhadap administrasi kependudukan bisa terpenuhi walaupun libur jam kerja.

### **Dampak Inovasi PESAT antara lain:**

Sebelum adanya Inovasi PESAT:

1. Masyarakat tidak bisa mendapatkan Pelayanan Publik sesuai dengan waktu kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Pronojiwo.
2. Masyarakat yang sekolah atau bekerja di luar daerah tidak bisa melakukan pelayanan dikarenakan belum libur.
3. Letak geografis desa-desa yang sangat luas dan plosok yang sangat ekstrem sehingga kesulitan untuk pengurusan dokumen.

Setelah adanya Inovasi PESAT:

1. Masyarakat termudahkan untuk penerbitan dokumen adminduk
2. Masyarakat topografinya yang sangat ekstrem dan plosok sehingga mudah untuk pengurusan dokumen.
3. Masyarakat bisa mendapatkan Pelayanan Publik sesuai dengan waktu kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Pronojiwo.
4. Masyarakat yang sekolah atau bekerja di luar daerah bisa melakukan pelayanan walaupun jam libur kantor.
5. Masyarakat bisa tahu pentingnya dokumen kependudukan.

#### **D. Kendala Pelaksanaan Inovasi**

Setelah dilakukan inovasi Pelayanan Hari Sabtu Sampai Tuntas terdapat beberapa masalah antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat, belum sepenuhnya masyarakat tahu akan inovasi ini.

### **3. JUDUL INOVASI: PCH (Pronojiwo Creative House).**

#### **A. Latar Belakang**

Pronojiwo merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Lumajang. Kecamatan Pronojiwo diuntungkan oleh geografis yang berada di wilayah lereng Gunung Berapi Semeru, dan menyebabkan tanah di wilayah Kecamatan Pronojiwo Sangat subur. Selain sangat subur, panorama di Kecamatan Pronojiwo sangat indah dan Masih banyaknya potensi - potensi lokal yang ada di wilayah kecamatan pronojiwo yang belum digali, dikenali dan dikembangkan, baik dari segi sosial, budaya, pariwisata, dan perekonomian. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya *Pronojiwo Creative House* (PCH), yang merupakan wadah dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Pronojiwo, Agar potensi lokal di desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Pronojiwo dapat dikembangkan secara maksimal

#### **B. Tujuan**

Rumah kreatif merupakan sebuah laboratorium ide dan gagasan untuk semua stakeholders dalam menggali potensi lokal yang ada di Kecamatan Pronojiwo. Dengan adanya Rumah Kreatif diharapkan dapat menjadi ajang penguatan pemberdayaan baik aparatur kecamatan dan juga masyarakat dalam menggali potensi lokal wilayah yang ada di Kecamatan Pronojiwo. Dengan menyampaikan ide gagasan, memperkuat dengan pendampingan dan pelatihan serta sebagai ajang promosi potensi lokal. Secara umum, untuk penyelesaian masalah pokok, dan untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas pembangunan adalah menjadi tugas dan tanggungjawab semua Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang termasuk Kecamatan Pronojiwo. Mengingat jika hanya mengandalkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan dan Desa yang terbatas, maka akan sangat susah untuk memaksimalkan pengembangan potensi lokal. Maka dibutuhkan Rumah Kreatif untuk menjadi wadah dan jembatan serta pemicu pihak swasta atau NGO untuk turut serta mengembangkan potensi lokal yang ada di wilayah Kecamatan Pronojiwo

#### **C. Manfaat**

Pelaksanaan Inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dengan *Pronojiwo Creative House* di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang diharapkan akan sangat bermanfaat bagi stakeholders Internal maupun eksternal yaitu:

A. Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang :

1. Mendorong terciptanya banyak aktivitas Masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal yang akan meningkatkan perekonomian lokal daerah;
2. Memberikan arahan dan percepatan dalam pencapaian program pemberdayaan masyarakat.

B. Bagi Pemerintah Kecamatan Pronojiwo :

1. Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Mempermudah koordinasi dan fasilitasi kegiatan dalam menggali dan mengembangkan potensi desa antara Kecamatan dan Pemerintah Desa;
3. Meningkatkan Kapasitas aparatur kecamatan pronojiwo, karena turut serta berpartisipasi untuk menjembatani dan memudahhi hubungan antar stakeholder baik instansi pemerintah , *NGO*, dan komunitas penggiat potensi desa

C. Bagi Pemerintah Desa, Komunitas lokal, kelompok masyarakat di berbagai bidang, dan *NGO* :

1. Mendorong kreatifitas baru berbasis potensi lokal;
2. Mendapatkan apresiasi dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap aktivitas yang dilakukan;

D. Bagi Masyarakat Umum

1. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tentang potensi desa;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

**D. Dampak Adanya Inovasi**

Dampak Inovasi PCH antara lain :

**Sebelum adanya Inovasi PCH**

1. Aparatur Pemerintah Desa dan Kecamatan, serta Masyarakat belum optimal dalam menggali potensi lokal yang ada di wilayah Kecamatan Pronojiwo.
2. Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat susah mendapatkan akses informasi dan relasi tentang peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi wilayah. (hanya berfokus pada intervensi program dari pemerintah daerah)
3. Letak geografis desa-desa yang ada di plosok menjadi sebuah kelemahan atau dipandang tidak bisa dijadikan sebuah keuntungan. (skeptis)

**Setelah adanya Inovasi PCH**

1. Aparatur Pemerintah Desa dan Kecamatan, serta Masyarakat sangat optimal dalam menggali potensi lokal yang ada di wilayah Kecamatan Pronojiwo.

2. Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat mendapatkan akses informasi dan relasi tentang peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi wilayah. (NGO, Pihak Swasta, Komunitas Penggiat Potensi Lokal, dll.)
3. Letak Geografis serta topografi wilayah merupakan kekayaan sumberdaya lokal dan merupakan kelebihan dan keuntungan (Optimis)

#### **E. Kendala Pelaksanaan Inovasi**

Kecamatan Pronojiwo bukan OPD Teknis, sehingga untuk implementasi kegiatan harus menempuh alur hirarki birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga sedikit menjadi kendala dalam hal waktu pelaksanaan.

#### **F. Keterkaitan Inovasi dengan Pohon Kinerja**

Dengan penjelasan di atas, maka dapat diambil benang merah dan kesimpulan keterkaitan inovasi PCH dan pohon kinerja Kecamatan Pronojiwo adalah sebagai berikut :

Inovasi PCH seperti penjelasan di atas, dapat berdampak pada tujuan Kecamatan Pronojiwo pada pohon kinerja yakni dapat meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan Pronojiwo, karena dengan mencari hubungan relasi kepada pihak pemerintah (dinas terkait) dan Swasta (NGO, Komunitas, dan Lembaga Swasta lainnya), maka kita juga belajar dan menadapatkan *Benefits* dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini terwakili oleh tugas dan fungsi seksi pemberdayaan.

Dengan adanya inovasi PCH fungsi Faskor dapat meningkat dengan sasaran Peningkatan Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

Dengan adanya inovasi PCH, dapat meningkatkan Reformasi Birokrasi karena adanya *Capacity Building* yang diberikan oleh pemerintah atau pihak swasta kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

#### **4. JUDUL INOVASI: KUMBAKARNA (Kumpul Bareng Kaur Perencana)**

##### **A. Latar Belakang**

Pronojiwo merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Lumajang. Kecamatan Pronojiwo diuntungkan oleh geografis yang berada di wilayah lereng Gunung Berapi Semeru, dan menyebabkan tanah di wilayah Kecamatan Pronojiwo Sangat subur. Selain sangat subur, panorama di Kecamatan Pronojiwo sangat indah dan Masih banyaknya potensi - potensi lokal yang ada di wilayah kecamatan pronojiwo yang belum digali, dikenali dan dikembangkan, baik dari segi sosial, budaya, pariwisata, dan perekonomian. Kecamatan Pronojiwo mempunyai 6 Desa yang mempunyai potensi SDM yang berbeda-beda sehingga masih banyak ditemukan permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan, Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dibentuk wadah untuk menyamakan persepsi tentang pola pikir seorang perencana agar Perencanaan Desa yang baik dapat terwujud.

##### **B. Tujuan**

Kumpul Bareng Kaur Perencanaan (Kumbakarna) merupakan sebuah wadah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa khususnya Kaur Perencanaan. Dengan adanya Kumbakarna diharapkan kedepan Kaur Perencanaan lebih memiliki pemikiran dan ide lebih terbuka terkait perencanaan di desa. Karena selama ini semua Desa di Kecamatan Pronojiwo masih menitikberatkan perencanaannya pada kegiatan pembangunan fisik saja, padahal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, bahwa desa diamanatkan untuk memprioritaskan Program Padat Karya Tunai Desa.

##### **C. Manfaat**

Pelaksanaan Inovasi Kumbakarna di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang diharapkan akan sangat bermanfaat bagi program kegiatan desa kedepan yaitu:

###### **A. Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang:**

1. Memberikan banyak gambaran kegiatan pemberdayaan masyarakat guna mendorong terciptanya banyak aktivitas Masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal yang akan meningkatkan perekonomian lokal daerah;
2. Memberikan banyak referensi bagi OPD teknis untuk mempertajam inovasinya guna meningkatkan kompetensi masyarakat dibidang masing – masing guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

###### **B. Bagi Pemerintah Kecamatan Pronojiwo:**

1. Memberi banyak gambaran inovasi tugas dan fungsi khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat;
  2. Meningkatkan Kapasitas aparatur kecamatan pronojiwo, karena turut serta berpartisipasi dalam shareing rencana program kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa.
- C. Bagi Pemerintah Desa, Komunitas lokal, kelompok masyarakat di berbagai bidang, dan NGO:
1. Mendorong kreatifitas baru berbasis potensi lokal;
  2. Mendapatkan apresiasi dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap aktivitas yang dilakukan;
  3. Membuka peluang baru pengembangan potensi lokal diberbagai bidang.
- D. Bagi Masyarakat Umum
1. Mendapatkan dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah dalam pengembangan kapasitas guna meningkatkan perekonomian;
  2. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

#### **D. Dampak Adanya Inovasi**

Dampak Inovasi KUMBAKARNA antara lain:

##### **Sebelum adanya Inovasi KUMBAKARNA**

1. Kaur Perencanaan belum optimal dalam menggali Program/ Kegiatan yang bisa memberikan manfaat berkelanjutan.
2. Kaur Perencanaan masih belum rinci membaca potensi masyarakat didesanya;
3. Masyarakat belum memahami pentingnya kegiatan desa berbasis pemberdayaan selain kegiatan pembangunan fisik.

##### **Setelah adanya Inovasi KUMBAKARNA**

1. Aparatur Pemerintah Desa memperoleh gambaran perencanaan kegiatan selain pembanguna fisik;
2. Meningkatkan kreatifitas Kaur Perencanaan dalam membuat perencanaan program kegiatan didesa;
3. Meningkatkan pemahaman terkait pentingnya membuat perencanaan yang memiliki manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

#### **E. Kendala Pelaksanaan Inovasi**

Komitmen dari masing – masing Kaur Perencana untuk mematuhi jadwal kegiatan.

## **F. Keterkaitan Inovasi dengan Pohon Kinerja**

Dengan penjelasan di atas, maka dapat diambil benang merah dan kesimpulan keterkaitan inovasi Kumbakarna dan pohon kinerja Kecamatan Pronojiwo adalah sebagai berikut :

Inovsi KUMBAKARNA seperti penjelasan di atas, dapat berdampak pada tujuan Kecamatan Pronojiwo pada pohon kinerja yakni dapat meningkatkan kapasitas aparatur baik aparatur di tingkat Kecamatan maupun aparatur Desa khususnya Kaur Perencanaan Desa. Kaur Perencana selaku pengemban tuisi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang mempunyai tugas menyusun RKPDesa, APBDDesa, dan LPPDesa tentu harus mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas. Selain mengemban tuisi penyusunan RKPDesa dan APBDDesa, Kaur Perencanaan juga selaku pengelola kegiatan dan menginventarisir pembangunan di Desa, sehingga apabila kapasitas Kaur Perencanaan Desa meningkat maka akan berdampak terhadap peningkatan kualitas Administrasi Pemerintahan Desa yang diharapkan dapat mengurai fenomena pada pohon kinerja Kecamatan Pronojiwo.

Dengan Inovasi Kumbakarna, fenomena yang ada diharapkan terselesaikan sehingga fungsi Fasilitasi dan Koordinasi serta Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kecamatan Pronojiwo dapat meningkat kualitasnya. Apabila kualitas fungsi Fasilitasi dan Koordinasi serta Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pronojiwo meningkat maka Kualitas Pelayanan kepada masyarakatpun akan meningkat sehingga indeks Reformasi Birokrasi juga akan meningkat.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Pronojiwo disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Pronojiwo berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan I tahun 2024 atau dalam jangka 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Triwulan I ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan I Tahun 2023 Kecamatan Pronojiwo telah memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 31 Maret 2024

